



Integrasi Islam Dalam Struktur Pemerintahan Dan Kehidupan Sosial Kedatuan Suppa Di Ajatappareng Abad 17 Masehi

Abdul Azis,¹ Nurul Ummisa,² Muh. Ardiansyah³

^{1, 2, 3}Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

abdulazisabdul42@gmail.com, ¹nurulummisa690@gmail.com, ²muhardiansyah517@gmail.com³

Received: 06, 2025. Revised: 07, 2025. Accepted: 08, 2025. Published: 09, 2025

Abstract:

The process of Islamization in the Kedatuan Suppa in the 17 century AD took place through various channels, not only influenced by trading activities and the arrival of preachers from outside, but also by the central role of the palace, especially Datu We Passulle Daeng Bulaeng. This research aims to examine how Islam was integrated into the governmental structure and the social life of the Suppa community at that time. By using the historical method which consists of heuristics, criticism, interpretation, as well as historiography and an anthropological-sociological approach, this research studies the role of the palace in institutionalizing Islam through the establishment of *Parewa Syara'* as well as the alignment of Bugis customs with the values of sharia. The results of the research show that Islam did not completely replace customs, but rather carried out a process of acculturation with local values that were in accordance with the principle of *tawhid*. This transformation is evident in governance, religious practices, and life rituals such as birth, marriage, and death. Overall, Islam appeared as a normative and cultural force that strengthened the socio-political order of the *Kedatuan Suppa* in an adaptive and transformative manner.

Keywords: Integration, Islamization, Government, Kedatuan Suppa.

Abstrak :

Proses Islamisasi di Kedatuan Suppa pada abad ke-17 Masehi berlangsung melalui berbagai jalur, tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan dan kedatangan para pendakwah dari luar, tetapi juga oleh peran sentral istana, khususnya Datu We Passulle Daeng Bulaeng. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana Islam diintegrasikan ke dalam struktur pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat Suppa pada masa tersebut. Dengan menggunakan metode historis yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, serta historiografi dan pendekatan antropologis-sosiologis, penelitian ini mengkaji peran istana dalam melembagakan Islam melalui pembentukan *Parewa Syara'* serta penyelarasan adat Bugis dengan nilai-nilai syariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam tidak menggantikan adat secara menyeluruh, melainkan melakukan proses akulturasi dengan nilai-nilai lokal yang sesuai dengan prinsip tauhid. Transformasi ini tampak dalam tata kelola pemerintahan, praktik keagamaan, hingga ritus kehidupan seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian. Secara keseluruhan, Islam hadir sebagai kekuatan normatif dan kultural yang memperkuat tatanan sosial-politik Kedatuan Suppa secara adaptif dan transformatif.

Kata Kunci: Integrasi, Islamisasi, Pemerintahan, Kedatuan Suppa.

PENDAHULUAN

Penyebaran Islam di Nusantara merupakan proses historis yang kompleks. Pada umumnya, masyarakat Nusantara relatif terbuka terhadap ajaran Islam karena agama ini menekankan nilai kedamaian, akhlak mulia, serta kemampuan beradaptasi dengan budaya lokal. Meskipun demikian, proses penerimaan Islam tidak sepenuhnya berlangsung tanpa hambatan. Di sejumlah wilayah, khususnya yang telah memiliki sistem kepercayaan mapan atau kekuasaan politik tradisional yang kuat, terjadi resistensi terhadap masuknya pengaruh baru tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa Islamisasi di Nusantara berlangsung secara bertahap, tidak serentak, dan penuh dinamika sosial. Adapun jalur penyebaran Islam meliputi aktivitas perdagangan, dakwah, perkawinan, serta hubungan politik, yang masing-masing memainkan peranan penting dalam memperluas pengaruh Islam.

Sejumlah teori akademik, seperti teori Arab, Persia, India, dan Cina, dikemukakan untuk menjelaskan awal mula kedatangan Islam ke Nusantara. Dalam konteks wilayah pesisir, misalnya Sumatera dan Sulawesi Selatan, perdagangan maritim menjadi jalur utama yang mempercepat proses penyebaran Islam. Para pedagang Muslim tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai agen dakwah yang memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat lokal. Meskipun demikian, penerimaan masyarakat berlangsung dengan intensitas berbeda di tiap daerah, bergantung pada kondisi sosial, politik, dan budaya setempat.¹

Khusus di Sulawesi Selatan, proses Islamisasi diawali oleh kehadiran tiga tokoh penting dari Minangkabau, yakni Datu ri Bandang (Abdul Makmur), Datu ri Tiro (Abdul Jawad), dan Datu ri Pattimang (Sulaiman). Ketiganya secara aktif menyebarkan Islam di wilayah kerajaan-kerajaan Bugis dan Makassar seperti Gowa, Tallo, Luwu, dan Bulukumba. Menurut sumber *Lontarak Attoriolong* dan *Lontara Sukkukna Wajo*, mereka juga berhasil mengislamkan Datu Luwu Baginda Patiwarra (Sultan Waly Muszakkiral Din) pada Ramadhan 1603 M (1013 H), serta Raja Gowa pada 9 *Jumadil Awal* 1014 H/22 September 1605 M.²

Kerajaan Suppa, atau lebih tepatnya Kedatuan Suppa, merupakan kerajaan klasik Bugis yang berdiri pada abad ke-15 M dan berlokasi di wilayah Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayahnya termasuk dalam kawasan Ajatappareng dan berbatasan langsung dengan Selat Makassar di bagian barat. Letaknya yang strategis menjadikan Suppa sebagai jalur penting bagi kegiatan perdagangan, termasuk interaksi dengan para pedagang Muslim dari berbagai daerah seperti Melayu, Arab, dan India.³

Proses penyebaran Islam di Kedatuan Suppa umumnya melalui pintu istana, yaitu dengan keterlibatan langsung para bangsawan dan penguasa kerajaan dalam memeluk Islam. Hal ini sejalan dengan pola umum Islamisasi di Sulawesi Selatan, di mana raja menjadi pemeluk pertama, lalu diikuti oleh rakyatnya. Islamisasi melalui jalur politik inilah yang mempercepat terbentuknya lembaga-lembaga keagamaan dalam struktur pemerintahan, serta memperkuat posisi Islam dalam kehidupan sosial masyarakat Suppa.

¹Intan Permatasari and Hudaidah Hudaidah, "Proses Islamisasi Dan Penyebaran Islam Di Nusantara," *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan* 8, no. 1 (2021): 1–9.

²Ahmadyani SPI, "Melacak Jejak Islamisasi Di Sidenreng Rappang Abad 17: Islamisasi, Sidenreng Rappang, Abad 17," *Al-Hikmah* 24, no. 1 (2022): 67–81.

³Muhammad Dalle and Muhammad Jundi, "Sosio-Politik Orang Bugis Dan Islamisasi Masyarakat Sulawesi Timur Di Zaman Kolonialisasi Belanda," *HEURISTIK: Jurnal Pendidikan Sejarah* 1, no. 2 (2021): 90–106.

Sebagai bentuk integrasi nilai-nilai Islam dalam struktur pemerintahan, Kedatuan Suppa membentuk sebuah lembaga baru dalam birokrasi kerajaan bernama *Parewa Sayara*, yang dipimpin oleh seorang *Qadhi* dan dibantu oleh tokoh-tokoh agama seperti *puang doja*, *puang bilala*, *puang katte*, dan *puang imam*. Mereka memiliki tanggung jawab dalam mengatur kegiatan keagamaan seperti Maulid Nabi, *Isra' Mi'raj*, serta hari-hari besar Islam lainnya, bahkan dalam tata cara pernikahan dan pemakaman kalangan bangsawan.⁴

Integrasi ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh Kerajaan Gowa, yang saat itu menjadi pusat kekuasaan Islam di Sulawesi Selatan. Sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad M. Sewang dalam bukunya "*Islamisasi Kerajaan Gowa Abad ke-XVI hingga Abad ke-XVII*", peran Gowa sangat menentukan dalam penyebaran Islam ke wilayah-wilayah sekitar termasuk Ajatappareng. Proses ini juga dikaji lebih lanjut dalam skripsi Ahmad Yani yang membahas tentang "*Islamisasi di Ajatappareng Abad XVI–XVII M*", yang menyoroti bagaimana integrasi Islam tidak hanya berdampak pada aspek keagamaan, tetapi juga pada aspek sosial, budaya, dan politik.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk menelusuri lebih dalam tentang bagaimana Islam tidak hanya hadir sebagai agama baru, melainkan juga menjadi bagian yang integral dari sistem pemerintahan dan tatanan sosial di Kedatuan Suppa pada abad ke-17 Masehi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejauh mana nilai-nilai Islam terintegrasi dalam struktur kekuasaan serta mempengaruhi dinamika kehidupan sosial masyarakat Suppa setelah konversi resmi penguasanya ke dalam Islam pada tahun 1609 M.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif-analisis sejarah berbasis kajian pustaka yang bertujuan untuk mengkaji proses integrasi Islam dalam sistem pemerintahan dan kehidupan sosial Kedatuan Suppa di Ajatappareng abad ke-17 Masehi. Untuk mengungkap persoalan tersebut, digunakan pendekatan multidimensional, meliputi historis, antropologi budaya, dan sosiologis. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri kronologi Islamisasi, pendekatan antropologi budaya menjelaskan transformasi adat dan budaya lokal dalam menerima pengaruh Islam, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis dinamika sosial serta peran struktur kekuasaan dalam melembagakan nilai-nilai Islam.

Metode penelitian kepustakaan ini mengikuti empat tahapan utama dalam metodologi sejarah yakni heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik dilakukan dengan menelusuri dan mengumpulkan sumber-sumber primer seperti lontarak, dokumen kerajaan, serta catatan arkeologis berupa masjid dan makam, dan sumber-sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, serta karya ilmiah yang relevan. Selanjutnya, dilakukan kritik sumber baik secara eksternal untuk menilai keaslian naskah maupun secara internal untuk menguji keakuratan isi dan konsistensi informasi.

Tahap interpretasi dilakukan dengan menelaah data-data kepustakaan yang telah tervalidasi untuk menemukan pola hubungan antarperistiwa, keterkaitan antara naskah lontarak, catatan sejarah kolonial, dan literatur akademik. Analisis juga diarahkan untuk

⁴Andi Yakub, "Dinamika Politik Bugis Sulawesi Selatan: Kesenambungan Dan Perubahan Terhadap Politik Desentralisasi" (Ghazali Shafie Graduate School of Government, Universiti Utara Malaysia, 2019).

⁵Ahmad M Sewang, *Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI Sampai Abad XVII* (Penerbit Obo, 2005).

mengidentifikasi sejauh mana nilai-nilai Islam terintegrasi ke dalam struktur pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat Suppa. Penafsiran ini dilakukan secara komparatif dengan memperhatikan kesesuaian dan perbedaan antar-sumber, sehingga diperoleh gambaran yang lebih obyektif. Hasil analisis kemudian disusun dalam tahap historiografi dengan cara menyajikan narasi ilmiah secara kronologis dan tematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Islamisasi di Kedatuan Suppa

Proses masuknya Islam ke Indonesia menimbulkan berbagai pandangan. Salah satu pandangan yang paling banyak diterima adalah bahwa Islam masuk melalui jalur perdagangan. Pandangan ini didasarkan pada situasi perdagangan global pada masa itu serta letak geografis Indonesia yang sangat strategis. Kepulauan Indonesia berada di sepanjang rute laut internasional, khususnya Samudra Hindia dan Selat Malaka, yang sejak lama menjadi jalur utama lalu lintas perdagangan dunia. Dalam perspektif sejarah, aktivitas perdagangan di jalur ini sudah berlangsung intensif sejak abad ke-17 M, bahkan sebelumnya. Para pedagang Muslim dari Arab, India, Persia (Iran), dan Tiongkok singgah di pelabuhan-pelabuhan pesisir Nusantara. Melalui interaksi ekonomi dan sosial inilah ajaran Islam mulai diperkenalkan kepada masyarakat setempat, sehingga daerah pesisir menjadi pusat awal penyebaran Islam di Indonesia.

Pada tahap awal penyebaran Islam di Sulawesi Selatan yang dulu dikenal dengan sebutan *Ajatappareng*, wilayah pesisir dan pelabuhan dagang menjadi pintu utama pertemuan antara pedagang Muslim dengan masyarakat lokal. Kerajaan Gowa-Tallo, misalnya, sejak lama dikenal sebagai pusat perdagangan internasional yang ramai dan terbuka bagi pengaruh luar, termasuk Islam. Situasi serupa juga terlihat pada Kerajaan Suppa yang memiliki hubungan luas dengan dunia luar dan menampilkan ekspansi politik yang cukup besar di wilayah Sulawesi (*Ajatappareng*).

Berdasarkan catatan dalam naskah *Lontarak*, Suppa tercatat berhasil menaklukkan sejumlah daerah seperti Baroko, Toraja, Mamuju, Kaili, Kali, dan Toli-Toli. Selain itu, kerajaan ini juga memperoleh rampasan perang dan upeti dari wilayah-wilayah lain, antara lain Leworeng, Lemo-Lemo, Bulu Kapa, Bonto-Bonto, Bantaeng, Segeri, dan Passokkorang. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Kerajaan Suppa tidak hanya memiliki kekuatan politik dan militer yang dominan, tetapi juga memainkan peran penting dalam jalur interaksi dagang dan budaya di kawasan Sulawesi Selatan yang dulu dikenal dengan sebutan *Ajatappareng*. Dengan kondisi demikian, wajar apabila kerajaan ini menjadi salah satu pintu masuk dan pusat perkembangan Islam di wilayah tersebut.⁶

Sejak abad ke-15 Masehi, masyarakat Bugis terutama yang berada di wilayah Kerajaan Suppa telah dikenal sebagai pelaut ulung yang memiliki keterampilan tinggi dalam navigasi laut. Tradisi lisan masyarakat Bugis dan Makassar mencatat bahwa mereka secara aktif melakukan pelayaran ke berbagai wilayah, seperti Pulau Timor, Sumbawa, Aceh, Perlak, Singapura, Johor, hingga Malaka. Bahkan, pada masa pemerintahan Sultan Syah di Malaka (1424-1450 M), telah disusun peraturan khusus yang mengatur tata tertib bagi para pelaut,

⁶M Nur Ichsan Azis, "Ekonomi Maritim Kesultanan Makasar Abad XVII M.," *Thaqaifiyyat: Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam* 14, no. 2 (2013): 176–201.

yang menunjukkan pentingnya aktivitas maritim serta keterlibatan masyarakat Bugis dalam jejaring perdagangan dan pelayaran regional.⁷

Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Bugis, khususnya komunitas di Kerajaan Suppa, yang telah menjalin hubungan dengan berbagai wilayah di luar Ajatappareng, telah memiliki pengetahuan awal mengenai keberadaan agama Islam dan para pemeluknya. Meskipun pada tahap ini kesadaran serta perhatian mereka terhadap ajaran Islam belum terbentuk secara mendalam, informasi mengenai Islam telah dikenal dan mulai tersebar. Tahap ini menandai fase awal dalam proses penerimaan dan pengenalan Islam oleh masyarakat Suppa sebelum masuk pada tahap internalisasi nilai-nilai ajarannya.

Selain itu, tidak dapat disangkal bahwa kedatangan dan peran orang-orang Melayu serta Arab turut memberikan pengaruh signifikan dalam proses awal penyebaran Islam di Kedatuan Suppa, khususnya pada abad ke-16 Masehi. Pada periode ini, dunia Melayu tengah mengalami masa kejayaan melalui Kesultanan Malaka, sebuah kerajaan maritim yang sangat berpengaruh di Semenanjung Malaysia. Kesultanan Malaka dikenal karena kemampuannya dalam mengendalikan jalur strategis Selat Malaka, yang pada saat itu merupakan salah satu poros utama perdagangan internasional. Namun, kejayaan ini mulai meredup seiring dengan masuknya kekuatan kolonial Eropa ke wilayah Nusantara. Salah satu peristiwa penting yang menandai perubahan tersebut adalah penaklukan Kesultanan Malaka oleh Portugis pada tahun 1511 M, yang dipimpin oleh komandan militer Vasco da Gama.⁸

Setelah jatuhnya Kesultanan Malaka akibat serangan Portugis pada tahun 1511 M, terjadi gelombang migrasi besar-besaran dari orang Melayu ke berbagai wilayah pesisir Nusantara. Salah satu kawasan yang menjadi tujuan utama perpindahan ini adalah pesisir barat Pulau Sulawesi, khususnya wilayah Bacukiki, Suppa, dan Sawitto. Ketiga daerah tersebut, yang merupakan pusat pelabuhan penting dalam konfederasi Ajatappareng, menjadi titik strategis bagi para pendatang Melayu untuk membangun kehidupan baru. Di wilayah-wilayah ini, para pedagang Melayu tidak hanya melanjutkan aktivitas ekonomi, tetapi juga turut serta dalam proses penyebaran budaya dan agama Islam kepada masyarakat setempat.⁹

Proses masuknya Islam ke Kedatuan Suppa juga dipengaruhi oleh peran strategis Kerajaan Gowa. Pada masa itu, Gowa mengirim pasukannya ke wilayah Suppa melalui jalur Binanga Karaeng. Meskipun kedatangan pasukan Gowa tidak dianggap sebagai ancaman serius, Suppa dan Sawitto justru menyambutnya dengan sikap bersahabat dan memilih menjalin aliansi. Pada saat itu, We Passulle Datu Bissue memerintah sebagai penguasa di kedua kerajaan tersebut. Sebagai bentuk penghargaan atas kesediaannya menjadi sekutu Gowa, ia dianugerahi gelar “Daeng Bulaeng.” Keputusan ini didorong oleh keinginan masyarakat Suppa dan Sawitto untuk mengakhiri konflik yang selama ini membawa penderitaan dan ketidakstabilan di wilayah mereka.¹⁰

Lontarak *Akkarungeng Alitta* mencatat bahwa proses Islamisasi di wilayah Ajatappareng turut melibatkan langsung tokoh penting seperti Datuk ri Bandang dan Sultan

⁷Abd. Razak Daeng Patunru, *Sejarah Gowa* (Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1993).

⁸Yani Ahmad, “Islamisasi Di Ajatappareng Abad XVI–XVII: Suatu Kajian Historis,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 4 (2019).

⁹Singgih Tri Sulistiyono, “Paradigma Maritim Dalam Membangun Indonesia: Belajar Dari Sejarah,” *Lembaran Sejarah* 12, no. 2 (2016): 81–108.

¹⁰Syahrir Kila, *Sejarah Islam Di Pinrang* (Depdikbud Provinsi Sulawesi Selatan, n.d.).

Alauddin dari Gowa. Keduanya berperan aktif dalam mengislamkan para raja lokal, termasuk We Passulle Daeng Bulaeng, penguasa Kedatuan Suppa yang juga menjabat sebagai Addatuang Sawitto. Kehadiran mereka mendapat sambutan baik dari para pemimpin Ajatappareng. Pada tahun 1609 M, We Passulle Daeng Bulaeng secara resmi memeluk Islam, yang kemudian diikuti oleh rakyat dari kedua kerajaan yang berada di bawah kepemimpinannya.

Penerimaan Islam oleh para raja di Kedatuan Suppa wilayah Ajatappareng, yang kemudian diikuti oleh rakyatnya, menandai keberhasilan misi dakwah yang dijalankan oleh Datuk Ri Bandang dan Sultan Alauddin. Keberhasilan ini mencakup pengislaman raja-raja lokal dalam lingkup Konfederasi Ajatappareng, termasuk Kedatuan Suppa, sehingga memperkuat posisi Islam sebagai agama yang diterima secara luas di kawasan tersebut.¹¹

Pengaruh Islam dalam Struktur Pemerintahan Kedatuan Suppa

Terdapat struktur pemerintahan yang terdiri dari Raja, Matowa, Pabjual, dan beberapa pejabat lainnya yang mendukung pemerintahan Kedatuan Suppa sebelum Islam memengaruhinya. Matowa dan Pabcepat dianggap sebagai pemimpin tradisional. Dalam kapasitas mereka sebagai administrator, Matowa dan Pabjual merencanakan, mengoordinasikan, dan memelihara hubungan langsung atau ke bawah dengan masyarakat terkait peran mereka.

Pada tahun 1601 M. Raja yang disusul Pabcepat, Matowa, dan Arung Lili', Pakkaja, Passari, Paggalung, Pabbalu-balu, Paddare dan Paddengeng, Pangonroang Ongko/Ale' Karaja, membentuk kerangka kerajaan Limae Ajatappareng, khususnya Kedatuan Suppa. Namun pada tahun 1609 M, Islam dijadikan agama resmi kerajaan Suppa, dan didirikanlah organisasi pemerintahan baru bernama *Parewa Syara'*. Organisasi ini dipimpin oleh seorang *Qadhi*.¹² Pengangkatan *Parewa Syara'* berdampak signifikan pada sistem pemerintahan Kedatuan Suppa. Prosedur yang digunakan untuk menyampaikan *Parewa Syara'* kepada para bangsawan menunjukkan hal ini. Sistem politik di Kerajaan Suppa, khususnya proses pemilihan raja, secara langsung dipengaruhi oleh *Parewa Syara'*. Datu Suppa menaruh kepercayaan yang besar kepada *Parewa Syara'* untuk menyebarkan Islam di seluruh wilayahnya. Akuntabilitas *Parewa Syara'* sangat penting untuk memastikan struktur politik kerajaan tetap stabil mengingat keadaan proses Islamisasi.¹³ Struktur pemerintahan Kerajaan Suppa mengalami perubahan dengan munculnya *Parewa Syara'* atau *Qadhi*. Hal ini terlihat dari perpaduan adat dan perilaku pada masa itu. Menurut buku Syamzan Ukur, struktur organisasi *Parewa Syara'* mengikuti kerangka kabinet konvensional. Selain itu, terdapat kesetaraan dalam penataan tempat duduk, yakni datu duduk di sebelah kanan *Parewa Syara'* dan di sebelah kiri pejabat adat.

Setiap keputusan yang dibuat dalam proses pengambilan keputusan tampaknya memiliki peran penting yang dimainkan oleh *Parewa Syara'*. Misalnya, topik yang tidak tercakup dalam hukum kerajaan Suppa akan diselidiki berdasarkan norma-norma syariah. Sementara keputusan adat dapat dimodifikasi atau diterbitkan kembali dalam keadaan tertentu, keputusan syariah bersifat final dan tidak dapat dibatalkan. Status *Parewa Syara'*

¹¹Ahmad, "Islamisasi Di Ajatappareng Abad XVI–XVII: Suatu Kajian Historis."

¹²Darwas Rasyid, *Sejarah Kabupaten Daerah Tk.II Pinrang. Laporan Penelitian* (Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujungpandang, 1985).

¹³Syamzan Syukur, *Mengurai Jejak Islamisasi Kedatuan Luwu* (Esa Publishing, 2013).

yang diketuai oleh *qadhi* setara dengan pejabat adat di kedatuan. Lebih lanjut, Syamzan menyampaikan rasa terima kasihnya atas terpilihnya para penguasa syariat dari kalangan bangsawan, yang merupakan salah satu prasyarat bagi kaum bangsawan dan masyarakat untuk menerima kemajuan Islam atau dakwah para penguasa. Alasan masyarakat saat itu menanggapi khotbah yang disampaikan raja dengan baik adalah karena mereka memiliki tradisi meyakini bahwa raja adalah wakil Tuhan di muka bumi ini.¹⁴

Parewa syara' (Qadhi) bertugas mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menjadikan Islam sebagai bagian dari masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini meliputi praktik-praktik ibadah, upacara-upacara keagamaan (*maulid*, *isra' mi'raj*, dan hari-hari besar Islam lainnya), pemeliharaan bangunan-bangunan keagamaan, dan menyelenggarakan upacara-upacara perkawinan serta pemakaman. Bahkan ikut serta dalam perencanaan suksesi. Se jauh mana hukum adat dan hukum Islam dapat hidup berdampingan dalam hal warisan.¹⁵

Pengaruh kisah-kisah *Syara'* terhadap Suppa dalam menyebarkan Islam cukup besar. Mereka melakukan wawancara mendalam dari rumah, dan cara ini terbukti paling ampuh karena masyarakat dan *mubaligh* dapat berkomunikasi secara terbuka, sehingga terjadilah pembicaraan yang berlangsung lama. Empat kelompok utama *Parewa Syara' (Qadhi)* adalah Imam (*puang imam*), Khatib (*puang kate*), Bilal (*puang bilala*), dan Doja (*puang doja*).¹⁶ Hal inilah yang secara langsung turut membantu penyebaran Islam di wilayah Kedatuan Suppa. Seorang Imam, pejabat bawahan yang didukung oleh seorang *kate'* dan seorang *bilala*, ditugaskan di setiap *Palili'*. Akibat pertumbuhan penduduk, komunitas dan permukiman bermunculan di mana-mana. Masjid, yang juga dikenal sebagai langgar, merupakan prasyarat terbentuknya komunitas (fasilitas dasar untuk beribadah).

Salah satu tokoh agama yang ditunjuk untuk menjadi imam, memimpin masyarakat beribadah di desanya, akan tetapi, imam dan pembantunya juga bertanggung jawab langsung dalam menjalankan tugasnya sebagai pengurus sungai di jantung kerajaan, yang ditunjuk oleh masyarakat. Dengan kata lain, dari tingkat pusat sampai tingkat desa, lembaga/organisasi *Parewa Syara'* mengikuti lembaga/organisasi pengurus adat.

Dalam tradisi masyarakat Suppa adat dan syariat tidak dapat dipisahkan dalam memutuskan perkara, sebagaimana ungkapan yang populer dalam masyarakat yaitu apabila mendapatkan hambatan terhadap suatu masalah maka dikembalikan ke adat (untuk mencari pemecahannya) dan jika masi mendapatkan hambatan, maka kembalikan ke syariat, karena keputusan syariat merupakan keputusan Tuhan, yang tidak memiliki kecacatan. Pada kerajaan-kerajaan di pulau Sulawesi, Islam diterima sebagai agama kerajaan, bararti *sara'* (syariat Islam), telah diintegrasikan sistem *pangadereng* (wujud kebudayaan Bugis-Makassar).¹⁷ Dengan adanya integrasi ini, maka sistem *pangadereng* yang mulanya terdiri dari empat bagian, menjadi lima yaitu, *ade'*, *rapang*, *wari*, *bicara*, *sara'*.¹⁸ Dalam lontara

¹⁴Syamsuez Salihima, "Peta Politik Di Sulawesi Pada Awal Islamisasi," *Jurnal Rihlah* 2, no. 1 (2015): 33–44.

¹⁵Syahrir Kila, *Hubungan Kekerabatan Antara Kerajaan Suppa Dan Kerajaan Sawitto* (Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan, 2017).

¹⁶Rimba Alam A Pangerang, *Kerajaan-Kerajaan Sulawesi Selatan* (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2009).

¹⁷Taufiq Al and Islam Asrul, *Eksistensi Nilai Pangadereng Dalam Interaksi Sosial Masyarakat Bugis The Existence of Pangadereng Values in the Bugis Community Social Interaction*, 4, no. 1 (2023): 61–69.

¹⁸Nurnanigsih Nawawi, "Asimilasi Lontara Pangadereng Dan Syari'at Islam: Pola Perilaku Masyarakat Bugis-Wajo," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 15, no. 1 (2015): 21–41.

Latoa menjelaskan fungsi masing-masing kelima sistem *Pangadereng* tersebut, yaitu sebagai berikut.

Pertama, *Ade'* meliputi usaha masyarakat bugis dalam memperistiwakan diri dalam kehidupan bersama pada semua lapangan kebudayaan. Tiap-tiap segi kehidupan mengandung aspek *ade'*. Jika *pangaderang* merupakan wujud dari kebudayaan Bugis, maka *ade'* adalah kongkritisasinya. *Ade'* ini berwujud kaedah-kaedah perkawinan, keturunan, dan aturan-aturan tentang hak dan kewajiban, sopan santun dalam pergaulan dan lain-lain. Kedua, *Bicara*, yaitu suatu aktifitas yang berkaitan dengan peradilan, berfungsi sebagai tindakan terhadap pelanggaran *pengadereng*. Bicara berfungsi untuk memulihkan kembali yang benar. Pengawasan pembinaan bicara dalam kehidupan masyarakat yaitu hakim. Ketiga, *Rapang*, yaitu merupakan undang-undang atau hukum baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis. Keempat, *Wari'*, yaitu perbuatan yang melakukan kalsifikasi dari segala benda dan aktifitas dalam masyarakat, memelihara tata susunan dan tata penempatan hal-hal dan benda-benda dalam masyarakat, seperti memelihara jalur dan garis keturunan yang mewujudkan lapisan sosial. Kelima, *Sara'*, merupakan warna baru dari Islam dalam sistem panggadereng masyarakat bugis, dan bercampur dari aspek-aspek (*ade'*, *rapang*, *wari*, *bicara*) lainnya, maka seketika kehidupan masyarakat Bugis berubah, perubahan tersebut menurut Mattulada terletak pada adanya dua macam organisasi yakni *sara'* sebagai *ade'* dan sebagai *pangadereng* terkahir. *Sara'* sebagai organisasi *ade'* berkembang menjadi suatu kestabilan sosial, sebab jika salah satu unsur tidak berfungsi maka berdampak pada ketidakstabilan.¹⁹

Setelah masuknya *sara'* dalam *pangadereng* di kerajaan Suppa maka hal ini memberikan adil dalam mempengaruhi keputusan raja dan masyarakatnya dalam menghadapi permasalahan. Sebagai konsekuensi atas dimasukkannya *sara'* dalam *pangadereng* sekaligus menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang telah menerima Islam.

Pengaruh Islam Dalam Kehidupan Sosial Budaya Kedatuan Suppa

Setelah memeluk Islam, Datu Suppa We Passulle Daeng Bulaeng segera memerintahkan seluruh keluarga dan masyarakat di wilayahnya untuk mempelajari ajaran Islam setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena dalam pandangan masyarakat Suppa raja dipandang sebagai representasi *ilahi*, perintah dari sang penguasa diterima tanpa penolakan. Hal ini mempermudah proses Islamisasi, karena otoritas raja menjadi faktor utama dalam mendorong masyarakat untuk mengikuti keyakinan baru yang dianut pemimpinnya.²⁰

We Passule Daeng Bulaeng memainkan peran sentral namun tidak menonjol dalam proses internalisasi ajaran Islam di Kedatuan Suppa, khususnya dalam kapasitasnya sebagai pemimpin kerajaan. Sebagai raja, ia dikenal memiliki ketegasan terhadap berbagai praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, baik dalam lingkungan istana maupun di kalangan masyarakat umum. Di bawah kepemimpinannya, ajaran Islam mengalami perkembangan yang signifikan dan memperoleh tempat yang kokoh dalam tatanan sosial-politik kerajaan. Sebelum Islam diterima secara resmi sebagai agama negara, praktik-praktik seperti perjudian masih marak terjadi di tengah masyarakat. Namun, setelah Islam diakui sebagai agama resmi kerajaan, aktivitas perjudian secara tegas dilarang. Mereka yang tidak

¹⁹Darwas Rasyid, *Sejarah Kabupaten Daerah Tk.II Pinrang. Laporan Penelitian*.

²⁰Ahmad, "Islamisasi Di Ajatappareng Abad XVI–XVII: Suatu Kajian Historis." h.76

mematuhi ketentuan ini, bahkan setelah adanya pelarangan, dianjurkan untuk meninggalkan wilayah Kedatuan dan mencari tempat lain yang masih memperbolehkan praktik tersebut.

Selain itu, Datu Suppa turut menginisiasi transformasi dalam praktik keagamaan lokal dengan mengganti tradisi Jumat malam yang dikenal sebagai *sikkiri juma* yakni ritual pengingatan hari Jumat yang sebelumnya disertai dengan penghormatan terhadap artefak keramat *arajang* serta komunikasi spiritual dengan kaum *Bissu*. Perubahan ini mencerminkan upaya sistematis dalam menghapus elemen animistik dan sinkretistik dari struktur kepercayaan masyarakat. Sebelum kedatangan Islam, dalam prosesi keagamaan masyarakat Suppa, dikenal pula pembacaan *Surek Selleyang*, yaitu teks doa yang ditujukan untuk memuja para dewa. Namun, setelah Islam mulai terintegrasi dalam kehidupan sosial-keagamaan, bacaan tersebut digantikan dengan *Barzanji*, sebuah teks pujian terhadap Nabi Muhammad yang berasal dari tradisi Islam Sunni.²¹

Datu Suppa juga mengambil langkah strategis dalam penguatan pendidikan keagamaan dengan membangun sejumlah pondok di wilayah kekuasaannya. Keberadaan pondok-pondok tersebut terbukti efektif sebagai lembaga informal di luar lingkungan rumah tangga, yang berfungsi sebagai tempat pembinaan dan pendidikan bagi generasi muda. Metode pendidikan ini dikenal secara lokal dengan istilah *mengaji tudang*, yang mengacu pada praktik para murid yang duduk bersila menghadap guru sembari menerima pengajaran agama. Model ini tidak hanya memperkenalkan ajaran Islam, tetapi juga menjadi sarana internalisasi nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Suppa.

Pada masa pemerintahan We Passulle Datu Bissue, dibentuk sebuah lembaga baru bernama *parewa syara'* yang berfungsi sebagai instrumen pendukung dalam mempercepat proses penyebaran Islam di wilayah Kedatuan Suppa. Lembaga ini memiliki peran signifikan sebagai pusat pendidikan dasar keislaman, khususnya bagi para pemula yang mempelajari pembacaan Al-Qur'an dan praktik ibadah seperti salat. Para pengajar dalam lembaga ini berasal dari kalangan *parewa syara'* itu sendiri. Bagi mereka yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan agama tinggi, umumnya harus menimba ilmu di luar wilayah Suppa. Setelah menyelesaikan studi, mereka para pelajar tersebut biasanya kembali ke kampung halaman untuk mengajarkan ilmu yang telah diperoleh. Pola pendidikan semacam ini dikenal di kalangan masyarakat lokal dengan sebutan *mengaji kitta*, yang menandai jenjang lanjutan dalam sistem pengajaran Islam bersifat berkesinambungan dan berorientasi pada pengabdian.

Selain pendirian institusi-institusi pendidikan oleh pihak kerajaan yang ditujukan untuk mempercepat penyebaran ajaran Islam di wilayah Kedatuan Suppa, antusiasme masyarakat dalam mencari ilmu keislaman juga terlihat sangat tinggi. Hal ini tercermin dari banyaknya individu yang secara sukarela belajar kepada para ulama lokal yang dikenal dengan sebutan *anre guru*, keberadaannya tersebar luas hingga ke pelosok kampung. Partisipasi aktif penguasa, khususnya Datu Suppa, dalam mendukung proses Islamisasi memberikan kontribusi besar terhadap tumbuhnya semangat keagamaan di kalangan rakyat. Besar kemungkinan bahwa Datu We Passulle Daeng Bulaeng juga mengutus sejumlah orang kepercayaannya untuk menuntut ilmu agama di luar wilayah Suppa, sebagai bagian dari strategi memperkuat fondasi keilmuan Islam di lingkungan kerajaannya.

²¹Kila, *Sejarah Islam Di Pinrang*. h. 140

Dalam upaya memperluas wawasan keislaman masyarakat, tidak banyak sumber yang secara eksplisit menyebutkan adanya pengiriman resmi dari pihak Kerajaan Suppa ke luar daerah untuk menuntut ilmu agama, kecuali tiga nama yang tercatat, yaitu Pallipa Pute, Bulu' Nene, dan Hasan bin Abdul Latief bin Abdul Rahiem. Di antara ketiganya, salah satu tokoh dikenal memiliki kepakaran mendalam dalam bidang fiqih, sehingga oleh masyarakat diberi gelar "Tuan Pakkihi", yang secara harfiah berarti ahli dalam ilmu fiqih. Gelar tersebut mencerminkan kedalaman ilmu keislaman yang dimiliki dan kontribusinya dalam membimbing masyarakat mengenai hukum-hukum Islam, termasuk aspek ibadah, hukum keluarga, hingga hukum ketatanegaraan.

Selain Datu We Passulle Daeng Bulaeng yang memainkan peran utama dalam penyebaran Islam, ketiga tokoh tersebut juga sangat berperan penting dalam mengembangkan Islam di wilayah Suppa. Ketiganya diketahui pernah memperdalam ilmu agama Islam di pusat pembelajaran Islam di Gowa, yang saat itu telah menjadi salah satu pusat keilmuan Islam terkemuka di kawasan timur Nusantara. Setelah menamatkan pendidikan, mereka kembali ke kampung halaman dan berperan sebagai pengajar serta penyebar ajaran Islam. Tuan Pakkihi misalnya, dengan konsisten menyebarkan Islam melalui pengajaran fiqih, yang mencakup pelbagai aspek peraturan syariat. Sementara itu, Pallipa Pute dan Bulu' Nene turut serta mendukung dakwah Islam di wilayah Suppa dan sekitarnya secara aktif.

Ketiga tokoh ini kemudian dikenal sebagai pelopor penyebaran Islam pertama di kawasan Suppa dan Sawitto. Masa hidup mereka hampir seluruhnya diabdikan untuk kemajuan kerajaan, terutama dalam aspek keagamaan. Mereka diketahui sebagai murid langsung dari ulama besar Datuk ri Bandang, yang memainkan peran sentral dalam proses Islamisasi di kawasan pulau Sulawesi.²²

Proses Islamisasi di Kerajaan Suppa tidak hanya dipengaruhi oleh intervensi kalangan penguasa seperti raja dan bangsawan, tetapi juga oleh interaksi aktif masyarakat lokal dengan para pedagang Muslim dari berbagai wilayah, seperti Sumatra, Jawa, hingga Persia. Faktor lain yang turut mempercepat penyebaran Islam adalah strategi dakwah yang dilakukan oleh para mubaligh dan ulama lokal, yang berhasil menyesuaikan ajaran Islam dengan tradisi masyarakat setempat. Meskipun demikian, peran istana tetap menjadi saluran utama dalam memperkenalkan Islam di wilayah Suppa, yang kemudian diperkuat oleh aktivitas ulama, mubaligh, serta lembaga parewa syara' yang dibentuk pada masa tersebut.²³ Dengan diterimanya Islam di Kedatuan Suppa, banyak merubah nilai-nilai, kaedah-kaedah kemasyarakatan Suppa. Selain itu juga dengan kedatangan Islam di kedatuan dapat menambah dan memperkaya kebudayaan Suppa, seperti halnya:

Perkawinan

Dalam budaya Bugis, termasuk masyarakat Kedatuan Suppa, institusi perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting dan dijunjung tinggi sebagai sarana mempersatukan dua keluarga besar. Perkawinan bukan hanya dianggap sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang berdampak pada struktur kekerabatan dan kehormatan komunitas adat.²⁴ Oleh karena itu, pelaksanaannya harus mengikuti tata cara dan

²²Syahrir Kila, *Sejarah Islam di Pinrang*. h. 142

²³Ahmad, "Islamisasi Di Ajatappareng Abad XVI–XVII: Suatu Kajian Historis." h. 77

²⁴Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Di Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat* (Ghalia Indonesia, 1989). h. 187

norma-norma yang telah diwariskan secara turun-temurun. Di Suppa, sejumlah ritual pra-Islam dalam tradisi perkawinan tetap dilestarikan meskipun masyarakat telah memeluk Islam pada abad ke-17. Beberapa tahapan utama dalam adat pernikahan tersebut adalah pertama *mabbalwoccici*, fase penyelidikan atau pemeriksaan rahasia terhadap latar belakang calon mempelai. Kedua *mammanu'-manu'*, yaitu proses lamaran resmi oleh keluarga pihak laki-laki dengan mengutus orang-orang terhormat. Ketiga *mappacci*, yaitu upacara pensucian diri sebagai simbol pembersihan jiwa dan restu keluarga. Keempat *menre' botting*, yaitu tahap membawa mempelai perempuan ke rumah pengantin laki-laki.²⁵

Meskipun struktur ritus-ritus adat tersebut tetap bertahan, Islam membawa perubahan dalam substansi spiritualnya. Salah satu bentuk perubahan mencolok terlihat dalam penggantian peran *sanro* (dukun) sebagai pemimpin spiritual dengan *qadhi* atau imam yang membacakan doa-doa keislaman dalam ritual pernikahan. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran otoritas keagamaan dari sistem kepercayaan lokal kepada otoritas Islam yang lebih formal dan berbasis syariat. Selain itu, tradisi baru yang tidak ditemukan dalam adat pra-Islam mulai diperkenalkan, seperti *mappatamma korang* (khatam Qur'an), yakni prosesi khataman Al-Qur'an oleh mempelai laki-laki di hadapan *qadhi* sebagai syarat menunjukkan kedewasaan spiritual sebelum dilanjutkan dengan pembacaan Barzanji.

Dari berbagai penyesuaian ini dapat dikatakan bahwa Islam tidak serta-merta menggantikan seluruh struktur budaya lokal yang telah mengakar, melainkan menyerap, menyesuaikan, dan memberi nuansa baru pada ritus-ritus adat yang ada. Islamisasi dalam konteks ini bersifat adaptif, mempertahankan kerangka budaya lokal sembari memperkenalkan nilai-nilai Islam dalam ritual yang dianggap sakral, seperti pernikahan. Proses ini mencerminkan akulturasi budaya dan agama yang harmonis antara tradisi Bugis-Suppa dan ajaran Islam yang baru diterima.

Kelahiran

Penerapan upacara inisiasi atau *rites of passage* yang dikenal sebagai ritual daur hidup (*life cycle ritual*) menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur sejauh mana ajaran Islam telah terinternalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat Kedatuan Suppa. Upacara-upacara tersebut memiliki peran sentral dalam menandai transisi kehidupan individu seperti kelahiran, pernikahan, hingga kematian yang masing-masing disertai dengan bentuk seremonial tertentu. Tradisi ini tidak hanya merefleksikan sistem nilai dan kepercayaan lokal, tetapi juga menunjukkan bagaimana budaya Bugis di Suppa memberikan penghargaan terhadap fase-fase penting dalam siklus hidup manusia.

Sebelum masuknya Islam, masyarakat Suppa telah memiliki tradisi ritual kelahiran yang dikenal dengan *maccera'ana*, yaitu serangkaian upacara untuk menyambut bayi yang baru lahir. Dalam upacara ini, keluarga melakukan penyembelihan hewan sebagai bentuk persembahan darah kepada *PatotoE* entitas adikodrati yang diyakini mengatur takdir sebagai ungkapan syukur atas kelahiran yang selamat. Tradisi ini sejalan dengan makna kata *cera* yang berarti darah, simbol utama dalam persembahan tersebut. Jumlah hewan yang disembelih ditentukan oleh status sosial atau kasta keluarga bayi, sedangkan waktu pelaksanaan ditentukan sendiri oleh pihak keluarga berdasarkan pertimbangan adat.²⁶

²⁵Eka Lestari, "Islamisasi Di Kerajaan Luwu Abad XVII" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014).

²⁶Nurhayati Djamas, "Varian Keagamaan Orang Bugis Makassar," in *Agama Dan Realitas Sosial*, ed.

Setelah Islam diterima secara resmi di Kedatuan Suppa pada awal abad ke-17 masehi, terjadi pergeseran signifikan dalam bentuk dan makna ritual kelahiran tersebut. Tradisi pra-Islam *maccera'ana* bertransformasi menjadi *aqiqah*, yakni ritual yang diatur oleh syariat Islam. Dalam praktik Islam, penyembelihan hewan dilakukan bukan untuk persembahan kepada kekuatan gaib, melainkan sebagai bentuk ibadah dan rasa syukur kepada Allah. Ketentuan *sara'* (hukum Islam) menetapkan bahwa untuk bayi laki-laki disembelih dua ekor kambing, sedangkan untuk bayi perempuan cukup satu ekor kambing. Selain itu, pada saat *aqiqah*, rambut bayi dicukur sebagai simbol penyucian diri, yang kemudian ditimbang dan nilainya disedekahkan dalam bentuk perak atau emas.

Namun demikian, dalam beberapa praktik, unsur-unsur budaya pra-Islam masih terlihat dalam pelaksanaan *aqiqah*. Sebagaimana dicatat oleh Ahmad Sewang dalam penelitiannya tentang Islamisasi Kerajaan Gowa, tradisi pemotongan rambut pada bayi tidak serta-merta lepas dari simbolisme lokal. Salah satunya adalah penyimpanan alat cukur rambut pada pohon kelapa yang telah dilubangi dan diisi air kelapa. Hal ini diyakini sebagai perlambang agar si anak kelak tumbuh kuat dan lentur seperti pohon kelapa berakar kuat namun tetap lentur dalam menghadapi perubahan zaman. Simbolisme ini menunjukkan bagaimana Islamisasi di Suppa berlangsung secara akomodatif, tidak meniadakan seluruh warisan budaya lokal, melainkan menyerap dan memberi makna baru dalam bingkai nilai-nilai Islam.²⁷

Kematian

Pada masa pra-Islam di Kedatuan Suppa, praktik pemakaman memiliki dimensi spiritual dan simbolik yang khas, mencerminkan sistem kepercayaan lokal yang berakar pada tradisi *aluk todolo'* (kepercayaan leluhur). Ketika seseorang meninggal, harta benda kesayangan almarhum kerap dikuburkan bersamanya sebagai bentuk penghormatan dan bekal menuju alam *baka*. Masyarakat meyakini bahwa tindakan ini juga berfungsi untuk meredam potensi gangguan roh halus terhadap keluarga yang ditinggalkan. Namun, keyakinan ini lambat laun mengalami perubahan signifikan seiring dengan masuknya Islam sebagai agama resmi di Kedatuan Suppa pada abad ke-17 masehi.

Setelah Islam diterima secara luas, ritus kematian mengalami restrukturisasi yang cukup mendasar. Peran spiritual dalam prosesi kematian yang sebelumnya dilaksanakan oleh tokoh adat atau pemangku kepercayaan lokal, beralih kepada tokoh-tokoh agama Islam seperti *qadhi*, imam, bilal, khatib, dan *doja*. Mereka bertugas memimpin seluruh rangkaian perawatan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menshalatkan, hingga memakamkan sesuai dengan ketentuan *syara'* (hukum Islam). Pergeseran ini menandai transisi penting dari sistem religi tradisional ke sistem ritual Islam yang bersifat normatif dan terstandarisasi.

Salah satu bentuk ritus pra-Islam yang menonjol adalah praktik kremasi, yang dahulu dikenal sebagai metode penguburan sekunder di masyarakat Suppa. Pada praktik ini, jenazah dibakar dan terkadang disertai dengan manik-manik atau benda berharga lain yang dikuburkan bersama abu jenazah sebagai lambang status dan penghormatan terakhir. Tradisi ini perlahan ditinggalkan setelah pengaruh Islam menguat, dan digantikan dengan metode

Mukhlis and Kathryn Robinson (Leohas, 1986).

²⁷Ahmad M Sewang, *Islamisasi Kerajaan Gowa, Pertengahan Abad XVI Sampai Pertengahan Abad XVII* (Penerbit Obo, 2005). h. 194

penguburan langsung ke tanah, sesuai dengan ajaran Islam, di mana pemakaman dipimpin oleh seorang *qadhi* atau imam yang membacakan doa-doa pengantar ruh.

Meskipun demikian, jejak-jejak budaya pra-Islam tidak sepenuhnya hilang. Salah satu contohnya adalah tradisi “jaga malam” yang sebelumnya dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap roh orang yang meninggal sebelum proses kremasi dilaksanakan. Dalam konteks Islamisasi, tradisi ini mengalami modifikasi. Kini, malam-malam tertentu pasca-kematian seperti malam ketujuh, keempat belas, dan keseratus masih diperingati, namun dengan pembacaan Al-Qur'an secara berjamaah dan terbuka, menggantikan ritual magis atau mantera-mantera lama. Transformasi ini memperlihatkan bagaimana Islam diterima secara akomodatif dan diintegrasikan ke dalam kerangka budaya lokal, menghasilkan bentuk ritual baru yang tetap mempertahankan esensi penghormatan terhadap almarhum, namun dengan orientasi tauhid dan syariat yang lebih dominan.²⁸

Masuknya ajaran Islam ke dalam struktur sosial dan budaya Kedatuan Suppa membawa perubahan penting dalam cara masyarakat memahami adat istiadat lokal. Islam tidak hadir untuk meniadakan seluruh tradisi, melainkan memperkuat adat yang sejalan dengan nilai-nilai kebaikan, serta merombak atau menggantikan adat yang dianggap bertentangan dengan prinsip moral dan ajaran tauhid. Transformasi tersebut tampak tidak hanya dalam norma-norma yang mengatur kehidupan rumah tangga dan kelembagaan keluarga, tetapi juga pada sistem sosial yang lebih luas, termasuk pola pergaulan masyarakat dan hubungan antarwarga. Dengan demikian, proses Islamisasi di Kedatuan Suppa memperlihatkan adanya pola akulturasi yang selektif dan transformatif, di mana adat luhur nenek moyang dipertahankan serta diberi legitimasi keagamaan, sedangkan adat yang dinilai bertentangan dengan syariat secara perlahan ditinggalkan atau digantikan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses integrasi Islam di Kedatuan Suppa abad ke-17 masehi tidak hanya merupakan fenomena keagamaan, tetapi juga mencerminkan dinamika transformasi budaya dan politik. Islam masuk melalui jalur istana dan segera diinstitusionalisasikan dalam bentuk lembaga keagamaan *Parewa Syara'*, yang berperan aktif dalam mengatur aspek keagamaan hingga sosial. Sistem pemerintahan Bugis mengalami penyesuaian dengan menempatkan syariat sebagai bagian dari *pangadereng*, sistem hukum adat lokal. Di sisi lain, nilai-nilai Islam mengubah ritus kehidupan masyarakat tanpa menyingkirkan adat sepenuhnya, melainkan mengakulturasinya. Dengan demikian, Islam tampil bukan sebagai pengganti kebudayaan lokal, melainkan sebagai kekuatan spiritual dan moral yang memperkaya serta memperkuat struktur sosial dan pemerintahan Kedatuan Suppa secara menyeluruh. Proses ini menjadi contoh keberhasilan Islamisasi yang tidak konfrontatif, tetapi harmonis dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Yani. “Islamisasi Di Ajatappareng Abad XVI–XVII: Suatu Kajian Historis.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 4 (2019). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324>.

²⁸Suryadi Mappangara, *Sejarah Islam Di Sulawesi Selatan* (Biro KAPP Setda Sulsel bekerja sama dengan Lamacca Press, 2003).

- . “Islamisasi Di Ajatappareng Abad XVI–XVII.” *Pusaka: Jurnal Khazanah Keagamaan* 8, no. 2 (2020): 145–60. <https://doi.org/10.24252/pusaka.v8i2.15429>.
- Ahmad, Yani, and M M. Dahlan. “Enforcement of Islam in France: Islamization, Development, and Existence.” *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.35905/aliftah.v3i1.3518>.
- Al, Taufiq, and Islam Asrul. “Eksistensi Nilai Pangadereng Dalam Interaksi Sosial Masyarakat Bugis The Existence of Pangadereng Values in the Bugis Community Social Interaction” 4, no. 1 (2023): 61–69.
- Azis, M Nur Ichsan. “Ekonomi Maritim Kesultanan Makasar Abad XVII M.” *Thaqafiyat: Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam* 14, no. 2 (2013): 176–201.
- Dalle, Muhammad, and Muhammad Jundi. “Sosio-Politik Orang Bugis Dan Islamisasi Masyarakat Sulawesi Timur Di Zaman Kolonialisasi Belanda.” *HEURISTIK: Jurnal Pendidikan Sejarah* 1, no. 2 (2021): 90–106.
- Darwas Rasyid. *Sejarah Kabupaten Daerah Tk.II Pinrang. Laporan Penelitian*. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujungpandang, 1985.
- Djamas, Nurhayati. “Varian Keagamaan Orang Bugis Makassar.” In *Agama Dan Realitas Sosial*, edited by Mukhlis and Kathryn Robinson, 289–310. Ujung Pandang: Leohas, 1986.
- Hairuddin, Andi Wandu. “Islamisasi Kerajaan Gowa Pada Abad XVI–XVII (Kajian Historis).” IAIN Parepare, 2018.
- Kila, Syahrir. *Hubungan Kekerabatan Antara Kerajaan Suppa Dan Kerajaan Sawitto*. Makassar: Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan, 2017.
- . *Sejarah Islam Di Pinrang*. Ujung Pandang: Depdikbud Provinsi Sulawesi Selatan, n.d.
- Lestari, Eka. “Islamisasi Di Kerajaan Luwu Abad XVII.” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5845>.
- Mappangara, Suryadi. *Sejarah Islam Di Sulawesi Selatan*. Makassar: Biro KAPP Setda Sulsel bekerja sama dengan Lamacca Press, 2003.
- Nawawi, Nurnanigsih. “Asimilasi Lontara Pangadereng Dan Syari’at Islam: Pola Perilaku Masyarakat Bugis-Wajo.” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 15, no. 1 (2015): 21–41.
- Pangerang, Rimba Alam A. *Kerajaan-Kerajaan Sulawesi Selatan*. Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2009.
- Patunru, Abd. Razak Daeng. *Sejarah Gowa*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1993.
- Permatasari, Intan, and Hudaidah Hudaidah. “Proses Islamisasi Dan Penyebaran Islam Di Nusantara.” *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan* 8, no. 1 (2021): 1–9. <https://doi.org/10.29408/jhm.v8i1.3406>.
- Salihima, Syamsuez. “Peta Politik Di Sulawesi Pada Awal Islamisasi.” *Jurnal Rihlah* 2, no. 1

(2015): 33–44.

Sewang, Ahmad M. *Islamisasi Kerajaan Gowa, Pertengahan Abad XVI Sampai Pertengahan Abad XVII*. Jakarta: Penerbit Obo, 2005.

———. *Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI Sampai Abad XVII*. Jakarta: Penerbit Obo, 2005.

Soewondo, Nani. *Kedudukan Wanita Di Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.

SPI, Ahmadyani. “Melacak Jejak Islamisasi Di Sidenreng Rappang Abad 17: Islamisasi, Sidenreng Rappang, Abad 17.” *Al-Hikmah* 24, no. 1 (2022): 67–81. <https://doi.org/10.24252/al-hikmah.v24i1.29425>.

Sulistiyono, Singgih Tri. “Paradigma Maritim Dalam Membangun Indonesia: Belajar Dari Sejarah.” *Lembaran Sejarah* 12, no. 2 (2016): 81–108.

Syukur, Syamzan. *Mengurai Jejak Islamisasi Kedatuan Luwu*. Makassar: Esa Publishing, 2013.

Yakub, Andi. “Dinamika Politik Bugis Sulawesi Selatan: Kesenambungan Dan Perubahan Terhadap Politik Desentralisasi.” Ghazali Shafie Graduate School of Government, Universiti Utara Malaysia, 2019.